

**EDUKASI HAK WAJIB PAJAK DAN ANALISIS PARTISIPASI PUBLIK DALAM ISU KENAIKAN PBB:
PENDEKATAN NILAI SILA KE-4 PANCASILA MELALUI WAWANCARA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI
MEDAN**

Artha Uly Sitorus, Natasya Octa, Feby Rosalina Sibagariang, Ica Al Zapirah
Universitas Negeri Medan

Email: arthaully.5223240025@mhs.unimed.ac.id

ABSTRAK

Studi ini menganalisis kasus kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati sebagai cerminan lemahnya penerapan nilai Sila Ke-4 Pancasila dalam kebijakan publik. Penelitian bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai etika kebijakan publik berbasis Pancasila serta menganalisis faktor-faktor struktural, sosial, dan etis yang memicu konflik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui kegiatan penyuluhan partisipatif, diskusi terpandu, dan simulasi musyawarah dengan melibatkan mahasiswa Universitas Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PBB dilakukan tanpa proses musyawarah, transparansi, dan pertimbangan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga menimbulkan krisis legitimasi, representasi, dan kepercayaan publik. Simpulan studi menekankan pentingnya penerapan nilai permusyawaratan, kebijaksanaan, dan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan untuk mencegah konflik dan memperkuat demokrasi lokal.

Kata Kunci: Kebijakan publik, Sila Ke-4 Pancasila, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), partisipasi publik, musyawarah, etika politik.

ABSTRACT

This study examines the case of the increase in Land and Building Tax (PBB) in Pati Regency as a reflection of the weak implementation of the 4th Principle of Pancasila in public policy. The research aims to enhance students' understanding of public policy ethics based on Pancasila and to analyze the structural, social, and ethical factors that triggered the conflict. The method used is a qualitative approach through participatory outreach activities, guided discussions, and deliberation simulations involving students of Universitas Negeri Medan. The findings indicate that the PBB increase was implemented without deliberation, transparency, and consideration of the community's economic capacity, leading to a crisis of legitimacy, representation, and public trust. The study concludes by emphasizing the importance of applying the values of deliberation, wisdom, and public participation in policy formulation to prevent conflicts and strengthen local democracy.

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No
234.KK.443

Prefix DOI :

10.9765/Krepa.V218.3784

Copyright : Author

Publish by : Krepa



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Keywords: *Public policy, 4th Principle of Pancasila, Land and Building Tax (PBB), public participation, deliberation, political ethics.*

PENDAHULUAN

Pada 13 Agustus 2025, massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Mereka memprotes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak drastis dan dianggap memberatkan masyarakat. Dalam foto ANTARA terlihat massa membawa spanduk bertuliskan “Lengserkan Bupati Arogan Penindas Rakyat,” yang menunjukkan tingginya tingkat ketidakpuasan publik.

Kasus ini menjadi contoh nyata pelanggaran etika demokrasi Pancasila, khususnya sila ke-4, karena:

1. Keputusan kenaikan PBB dilakukan tanpa musyawarah,
2. Tanpa sosialisasi publik yang memadai,
3. DPRD dinilai tidak menjalankan peran representasi,
4. Pemerintah dinilai tidak menggunakan hikmat kebijaksanaan,

Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran fundamental dalam memberikan arah moral dan etika bagi seluruh proses penyelenggaraan negara. Salah satu sila yang berfungsi sebagai pedoman etis dalam kebijakan publik adalah Sila Ke-4, yang mengamanatkan pentingnya permusyawaratan, kebijaksanaan, dan representasi dalam setiap pengambilan keputusan publik.

Menurut Kaelan (2016), sila ini memuat empat prinsip etika politik:

1. Kedaulatan rakyat,
2. Musyawarah,
3. Hikmat kebijaksanaan,
4. Perwakilan.

Namun realitas di lapangan sering menunjukkan ketidaksesuaian antara nilai dasar Pancasila dengan praktik pemerintahan. Kasus kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2025 menjadi contoh konkret ketika kebijakan pemerintah daerah tidak sejalan dengan prinsip etika Sila Ke-4.

Masyarakat Kabupaten Pati menilai pemerintah daerah menaikkan tarif PBB secara sepihak, tanpa melalui proses musyawarah dan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, terutama petani dan masyarakat pedesaan. Hal ini memicu aksi protes besar-besaran, yang bahkan meluas ke daerah lain.

Menurut teori Deliberative Democracy (Habermas), kebijakan publik hanya memiliki legitimasi ketika diputuskan melalui dialog rasional antara pemerintah dan masyarakat. Ketika dialog dihilangkan, kebijakan kehilangan legitimasi moral meskipun masih sah secara hukum.

Kasus ini sangat relevan untuk mahasiswa tingkat akhir, karena mereka perlu memahami bagaimana etika politik dalam Pancasila dapat digunakan untuk menganalisis, menilai, dan memberikan solusi terhadap kebijakan publik yang tidak sesuai nilai-nilai demokrasi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa tentang proses kebijakan publik dalam konteks PBB?
2. Apa saja faktor struktural, sosial, ekonomi, dan etis yang menyebabkan konflik kenaikan PBB?
3. Bagaimana peran pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat menurut etika Sila Ke-4?
4. Apa bentuk pelanggaran etika demokrasi dalam kasus tersebut?
5. Bagaimana penerapan nilai Sila Ke-4 dapat menjadi solusi penyelesaian konflik secara etis?

Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap kebijakan publik berbasis etika Pancasila.
2. Menganalisis secara teoritis hubungan antara kasus PBB dan nilai permusyawaratan demokratis.
3. Mengkaji peran DPRD dalam mewakili aspirasi rakyat dalam proses kebijakan.
4. Mengidentifikasi bentuk penyimpangan moral-etik dari Sila Ke-4.

5. Menghasilkan rekomendasi etis untuk penyelesaian konflik berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila.

KAJIAN TEORI

A. Pemahaman Mahasiswa Tentang Kebijakan Publik

Mahasiswa semester satu pada umumnya sudah memiliki dasar pengetahuan yang baik tentang konsep kebijakan publik. Namun pemahaman tersebut perlu diperdalam dalam konteks etika Pancasila, khususnya pada kasus yang menyangkut konflik antara pemerintah dan masyarakat seperti kenaikan PBB.

1. Definisi Kebijakan Publik (Dunn, 2003)

Berdasarkan sumber ahli mendefinisikan kebijakan publik sebagai:

Suatu rangkaian pilihan tindakan yang saling berkaitan, ditetapkan oleh badan atau pejabat pemerintah, untuk mencapai tujuan tertentu.”

1. Mahasiswa perlu memahami bahwa kebijakan publik:
2. tidak hanya mengenai konten kebijakan,
3. tetapi juga proses pembuatannya,
4. serta nilai-nilai moral yang mendasarinya.

Pada kasus kenaikan PBB:

Secara administratif, kebijakan mungkin sah. Namun secara etika (nilai Pancasila), kebijakan harus mempertimbangkan keadilan sosial, kemampuan ekonomi masyarakat, dan aspirasi publik.

2. Proses Pembuatan Kebijakan (Easton)

Model Easton menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan respons pemerintah terhadap input dari masyarakat. Input tersebut berupa:

1. Aspirasi Rakyat,
2. Tuntutan Atau Keluhan,
3. Kondisi Ekonomi Dan Sosial.

Ketika input ini tidak diserap, proses kebijakan menjadi tidak responsif.

Iniilah yang terjadi dalam kasus PBB Pati: masyarakat tidak dilibatkan sejak awal.

3. Civic Culture (Almond & Verba)

Mahasiswa berperan dalam membangun civic culture, yaitu budaya politik partisipatif. Dengan memahami kasus PBB melalui perspektif etika, mahasiswa:

1. Mengembangkan Budaya Kritis,
2. Mampu Mengevaluasi Kebijakan Publik Secara Argumentatif,
3. Menjadi Agen Moral Perubahan Demokrasi.

B. Faktor Penyebab Konflik Kebijakan PBB

Konflik tidak terjadi secara tiba-tiba. Menurut Coser (1956), konflik sosial muncul ketika terdapat ketidakseimbangan antara:

1. Kebutuhan Masyarakat,
2. Tindakan Pemerintah,
3. Dan Kemampuan Masyarakat Mengakses Saluran Aspirasi.

1. Kurangnya Transparansi Kebijakan

Menurut Denhardt (2015), birokrasi modern wajib menjaga keterbukaan informasi agar publik memahami tujuan kebijakan.

Dalam kasus PBB Pati:

1. Masyarakat Tidak Diberikan Penjelasan Tujuan Kenaikan,
2. Tidak Ada Sosialisasi Mengenai Dasar Perhitungan Tarif,
3. Publik Merasa “Kaget” Karena Kenaikan Dianggap Terlalu Besar.

Ketertutupan inilah sumber utama ketidakpercayaan.

2. Tidak Ada Musyawarah Publik

Ditinjau dari perspektif Demokrasi Deliberatif (Habermas):

1. Setiap Kebijakan Yang Berdampak Pada Masyarakat Harus Melalui Diskusi Publik,
2. Pemerintah Wajib Mendengarkan Argumen Moral Dan Pengalaman Warga.

Dalam kasus Pati, warga menilai tidak ada forum musyawarah, sehingga:

1. Proses Penetapan Perda Dianggap Sepihak,
2. Warga Kehilangan Ruang Partisipasi.

Ini merupakan pelanggaran langsung terhadap etika permusyawaratan dalam Sila Ke-4.

3. Representasi DPRD Tidak Optimal

Menurut Azhary (1995), DPRD memiliki tiga fungsi etis:

1. Representasi Aspirasi Rakyat,
2. Pengawasan Kebijakan Pemerintah Daerah,
3. Penyeimbang Kekuasaan Eksekutif.

Dalam kasus PBB, masyarakat menilai:

1. DPRD tidak menolak kebijakan yang memberatkan,
2. DPRD tidak menyerap keluhan masyarakat,
3. DPRD dianggap hanya menyetujui kebijakan tanpa musyawarah publik.

Akibatnya, rakyat merasa “ditinggalkan” oleh wakil-wakilnya.

4. Kenaikan Tidak Sesuai dengan Kemampuan Ekonomi

Dalam teori Ability to Pay (Adam Smith), pajak harus mempertimbangkan:

1. kemampuan masyarakat untuk membayar,
2. dampak sosial,
3. kondisi ekonomi riil.

Kebijakan PBB yang naik drastis dianggap tidak sesuai dengan kemampuan:

1. petani,
2. buruh,
3. masyarakat pedesaan. Ketidaksesuaian ini memicu konflik.

5. Saluran Aspirasi yang Buntu

Menurut teori Input-Output Policy System (Easton), jika saluran aspirasi tersumbat, masyarakat akan mencari cara lain untuk menyampaikan tuntutan, seperti:

1. aksi demonstrasi,
2. pembangkangan pajak,
3. tekanan sosial.

Di Pati, saluran formal seperti DPRD tidak berfungsi optimal sehingga massa turun ke jalan.

C. Peran Pemerintah, DPRD, dan Masyarakat**1. Peran Pemerintah Daerah**

Dalam etika Sila Ke-4, pemerintah wajib:

1. mengedepankan permusyawaratan,
2. mendahulukan kepentingan rakyat,
3. mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat,
4. tidak membuat kebijakan yang menimbulkan kerugian

sosial. Namun pada kasus ini, peran pemerintah daerah dinilai:

1. tidak responsif,
2. kurang terbuka,
3. tidak menggunakan “hikmat kebijaksanaan”.

Menurut Notonagoro, penguasa wajib menjalankan kekuasaan dengan moralitas Pancasila. Pelanggaran terhadap moral ini menyebabkan krisis legitimasi.

2. Peran DPRD sebagai Perwakilan

Dalam sistem perwakilan menurut teori Politik Representatif, DPRD memiliki kewajiban moral:

1. memperjuangkan kepentingan rakyat,
2. mengawasi pemerintah,
3. memastikan kebijakan selaras dengan keadilan sosial.

Pada kasus PBB, DPRD:

1. dianggap tidak melakukan uji publik,
2. lebih berpihak pada keputusan eksekutif,
3. gagal membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat.

Ini merupakan contoh kegagalan etika perwakilan dalam Sila Ke-4.

3. Peran Masyarakat

Menurut Almond & Verba, masyarakat berperan melalui:

1. partisipasi politik,
2. penyampaian aspirasi,
3. pengawasan sosial.

Aksi massa di Pati merupakan bentuk reaksi ketika:

1. mekanisme formal tidak berjalan,
2. keputusan dianggap tidak adil.

Masyarakat menjadi aktor yang mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan harus melibatkan rakyat.

D. Bentuk Pelanggaran Etika dalam Kasus PBB

Berdasarkan etika politik Pancasila, kasus ini memuat pelanggaran langsung terhadap unsur-unsur Sila Ke-4, yaitu:

1. Pengabaian Permusyawaratan

Keputusan ditetapkan tanpa:

4. dialog,
5. forum konsultasi publik,
6. musyawarah desa,
7. dengar pendapat.

Ini melanggar prinsip deliberasi demokratis.

2. Tidak Menggunakan Hikmat Kebijaksanaan

Kebijakan dinilai:

- tidak adil,
- tidak rasional terhadap kondisi ekonomi,
- tidak mempertimbangkan dampak sosial.

Menurut Notonagoro, pemimpin wajib mendasarkan keputusan pada moralitas, bukan sekadar prosedur hukum.

3. Representasi DPRD Tidak Berfungsi

Sila Ke-4 menuntut perwakilan rakyat yang:

- aktif mendengar rakyat,
 - memperjuangkan kepentingan rakyat,
 - hadir di tengah rakyat.
- Dalam kasus ini, peran DPRD dinilai tidak maksimal.

4. Kebijakan Tidak Mendahulukan Kepentingan Rakyat

PBB yang naik drastis dianggap lebih mementingkan pendapatan daerah daripada kesejahteraan rakyat. Ini bertentangan dengan prinsip:

- keadilan sosial (Sila 5),
- kerakyatan (Sila 4),
- kemanusiaan (Sila 2).

E. Penerapan Sila Ke-4 dalam Penyelesaian Konflik

Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi etika publik. Dalam konteks konflik PBB, penerapan etika Sila Ke-4 dapat menjadi solusi sebagai berikut:

1. Dialog dan Musyawarah Publik

Solusi utama adalah membuka:

1. forum musyawarah resmi,
2. pertemuan desa,
3. konsultasi publik terbuka.
4. Hal ini selaras dengan prinsip *deliberative democracy*.

2. Penggunaan Hikmat Kebijaksanaan

Pemerintah wajib:

1. menghitung ulang tarif PBB,
2. menilai dampak sosial,
3. menyesuaikan tarif dengan kemampuan masyarakat (ability to pay).
4. Kebijaksanaan berarti kebijakan harus adil secara moral.

3. Optimalisasi Fungsi DPRD

DPRD harus:

1. meninjau ulang Perda PBB,
2. menyampaikan aspirasi rakyat,
3. melibatkan akademisi dan tokoh masyarakat dalam uji publik.

4. Dialog Tripartit: Pemerintah DPRD Masyarakat

Untuk menghindari konflik lanjutan, harus dibuat dialog tiga pihak untuk:

1. merumuskan solusi bersama,
2. membangun kepercayaan publik,
3. menguatkan demokrasi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode partisipatif dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui kegiatan penyuluhan berbasis partisipasi yang melibatkan enam mahasiswa sebagai peserta utama. Teknik pengumpulan data meliputi diskusi terpandu, simulasi musyawarah peran (role-play) yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, serta analisis dokumen terkait kasus kenaikan PBB di Pati. Proses analisis data dilakukan secara induktif dengan menafsirkan hasil diskusi, observasi partisipan, dan refleksi peserta untuk mengidentifikasi pola pelanggaran etika Sila Ke-4 serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis nilai Pancasila. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta pemeriksaan konsistensi antara temuan lapangan dengan kerangka teoritis deliberative democracy dan etika politik Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2025 dengan melibatkan 6 mahasiswa semester satu sebagai peserta. Kegiatan pengabdian ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai etika kebijakan publik berbasis nilai-nilai Sila Ke-4 Pancasila. Selama proses penyuluhan, dilakukan beberapa aktivitas inti, yaitu pemaparan teori dasar mengenai kebijakan publik dan etika Pancasila, diskusi terarah mengenai kasus kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), simulasi musyawarah sebagai bentuk praktik deliberasi demokratis, serta penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai output pembelajaran seperti poster.

Aktivitas penyuluhan tidak hanya bersifat satu arah, tetapi interaktif. Pada sesi diskusi kasus, mahasiswa diminta menganalisis berbagai aspek kebijakan PBB, mulai dari latar belakang, proses perumusan, hingga implikasi sosialnya. Dalam simulasi musyawarah, mahasiswa dibagi ke dalam beberapa peran pemerintah daerah, DPRD, dan perwakilan Masyarakat untuk mensimulasikan proses permusyawaratan sesuai nilai etika politik Pancasila. Kegiatan ini membantu mahasiswa memahami praktik deliberatif dan dinamika representasi dalam situasi kebijakan publik.



Secara umum, respon peserta sangat positif. Responden menyatakan bahwa pendekatan

studi kasus dan simulasi musyawarah membuat materi Pancasila lebih kontekstual dan mudah dipahami. Mereka juga mengaku memperoleh pemahaman baru bahwa penerapan nilai permusyawaratan dan kebijaksanaan bukan sekadar konsep normatif, tetapi prinsip praktis dalam mencegah konflik kebijakan publik. Mahasiswa akan merasa lebih kritis dalam mengevaluasi kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas serta lebih mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran nilai Sila Ke-4 yang terjadi dalam realitas pemerintahan daerah.

Dari keseluruhan rangkaian kegiatan, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan ini berhasil meningkatkan literasi etis mahasiswa, memperkuat kemampuan analitis terhadap kasus publik, serta membangun kesadaran mengenai pentingnya partisipasi, dan representasi dalam sistem demokrasi Pancasila.

PEMBAHASAN

1. Krisis Etika Kebijakan Publik

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan PBB di Kabupaten Pati mencerminkan krisis etika kebijakan publik. Kebijakan tersebut ditetapkan tanpa melalui mekanisme musyawarah, tanpa konsultasi publik yang memadai, dan tanpa penjelasan transparan mengenai dasar perhitungan kenaikan. Hal ini bertentangan dengan etika permusyawaratan, etika kebijaksanaan, dan etika perwakilan yang terkandung dalam Sila Ke-4 Pancasila. Mahasiswa yang terlibat dalam penyuluhan menilai bahwa kebijakan publik seharusnya dirumuskan secara partisipatif dan mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif pemerintah.

2. Krisis Representasi DPRD

Pembahasan juga menyoroti kegagalan DPRD dalam menjalankan fungsi representatifnya. Berdasarkan hasil diskusi dan simulasi, mahasiswa menyimpulkan bahwa DPRD tidak optimal dalam menyerap aspirasi warga, tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap eksekutif, dan tidak menyediakan ruang deliberasi publik sebelum kebijakan ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga perwakilan tidak menjalankan peran etisnya sebagai penyampung suara rakyat, sehingga melemahkan kualitas demokrasi lokal dan meningkatkan potensi konflik sosial.

3. Krisis Kepercayaan Publik

Pelanggaran terhadap prinsip etika politik Pancasila berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ketidaktransparanan dan kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses kebijakan menimbulkan ketegangan sosial, meningkatnya aksi protes, serta munculnya delegitimasi terhadap kewenangan pemerintah. Mahasiswa yang berpartisipasi dalam pengabdian mengemukakan bahwa situasi tersebut merupakan konsekuensi etis yang dapat diprediksi ketika prinsip musyawarah, kebijaksanaan, dan representasi tidak dijalankan. Mereka sepakat bahwa penerapan nilai-nilai Sila Ke-4 merupakan langkah penting untuk memulihkan hubungan pemerintah dan masyarakat serta memperkuat legitimasi kebijakan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penyuluhan dan analisis terhadap kasus kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan lemahnya penerapan etika Sila Ke-4 Pancasila. Kenaikan pajak yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa musyawarah yang memadai menunjukkan bahwa prinsip permusyawaratan dan partisipasi masyarakat tidak diakomodasi secara layak dalam proses pengambilan keputusan. Kurangnya transparansi dan komunikasi dari pemerintah daerah menunjukkan bahwa kebijaksanaan sebagai nilai utama sila tersebut tidak digunakan secara optimal.

Kebijakan ini juga menimbulkan tekanan ekonomi dan keresahan sosial, sehingga memicu

aksi protes masyarakat. Situasi tersebut diperburuk oleh kurang efektifnya fungsi DPRD sebagai wakil rakyat dalam menampung aspirasi dan mengawasi kebijakan pemerintah daerah, sehingga terjadi krisis representasi yang melemahkan kepercayaan publik.

Melalui kegiatan penyuluhan, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih kuat mengenai pentingnya nilai-nilai etika Sila Ke-4 dalam penyusunan kebijakan publik. Mereka menyadari bahwa musyawarah, kebijaksanaan, dan orientasi pada kepentingan rakyat merupakan prinsip moral yang harus menjadi dasar setiap keputusan pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan lebih adil, demokratis, dan tidak memicu konflik sosial.

Dengan demikian, kasus kenaikan PBB di Pati memberikan pelajaran bahwa kebijakan publik harus disusun secara etis, partisipatif, dan berpihak pada rakyat. Selain itu, penyuluhan ini berhasil meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang peran etika Pancasila sebagai pedoman dalam memahami dan mengevaluasi dinamika kebijakan publik di Indonesia.

SARAN

1. Pemerintah harus menerapkan musyawarah publik sebelum membuat kebijakan strategis.
2. DPRD harus lebih aktif sebagai perwakilan rakyat.
3. Pemerintah perlu melakukan evaluasi ulang tarif PBB.
4. Mahasiswa harus terus berperan sebagai agen moral demokrasi.
5. Dialog tiga pihak harus dilakukan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture*. Princeton University Press.
- Azhary, M. (1995). *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Coser, L. (1956). *The Functions of Social Conflict*. New York: Free Press.
- Denhardt, J. & Denhardt, R. (2015). *The New Public Service*. New York: Routledge.
- Dunn, W. (2003). *Public Policy Analysis*. New Jersey: Pearson.
- Easton, D. (1965). *A Framework for Political Analysis*. Chicago: University of Chicago Press.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press.
- Kaelan. (2016). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Smith, Adam. (1776). *The Wealth of Nations*. London: Strahan & Cadell.